

Analisis Rencana Detail Tata Ruang dan Strategi Pengembangan Kawasan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Analysis of the Detailed Spatial Planning and Regional Development Strategy for the Kepulauan Seribu Regency

Ramones

Mahasiswa Universitas Terbuka, Indonesia
corresponding author: ramones@atrbtn.go.id

Submitted: July 13, 2025 | Accepted: August 17, 2025 | Published: September 2, 2025

Abstract: *The Detailed Spatial Plan (RDTR) of the Administrative Regency of the Kepulauan Seribu is a crucial instrument in supporting sustainable and adaptive coastal development. This region possesses unique geographical characteristics that require a spatial planning approach based on local ecosystem, social, and economic conditions. This study aims to analyze the strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) in the implementation of the RDTR of the Kepulauan Seribu, as well as provide strategic recommendations for regional development. The method used is a literature study with a descriptive-analytical approach based on secondary data. The analysis results show that the main strength of the region lies in its extensive tourism and conservation areas, while its primary weakness is the limited basic infrastructure and spatial data management. Significant opportunities arise from the growing trend of ecotourism and strong government policy support, yet the region also faces serious threats such as natural disasters and conflicts over spatial use. This study recommends the integration of technology, human resource development, and improved spatial governance as strategic steps toward achieving inclusive and sustainable spatial planning in the Kepulauan Seribu.*

Keywords: *Detailed Spatial Plan (RDTR), SWOT Analysis, Regional Planning*

Abstrak: *Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan dan adaptif. Wilayah ini memiliki karakteristik geografis unik yang menuntut pendekatan perencanaan ruang berbasis ekosistem, sosial, dan ekonomi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) dalam implementasi RDTR Kepulauan Seribu serta rekomendasi strategi dalam pengembangan kawasan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif analitis berbasis data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa kekuatan utama wilayah ini terletak pada luas kawasan pariwisata dan konservasi, sementara kelemahan utamanya adalah terbatasnya infrastruktur dasar dan pengelolaan data ruang. Peluang besar datang dari tren ekowisata dan dukungan kebijakan pemerintah, namun wilayah ini juga menghadapi ancaman serius seperti bencana alam dan konflik pemanfaatan ruang. Hasil penelitian ini merekomendasikan integrasi teknologi, peningkatan SDM, serta perbaikan tata kelola ruang sebagai langkah strategis untuk mewujudkan perencanaan ruang yang inklusif dan berkelanjutan di Kepulauan Seribu.*

Kata Kunci: *Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Analisis SWOT, Perencanaan Wilayah*



Article with open access under license a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Pendahuluan

Perencanaan wilayah merupakan proses manajemen strategis dalam pengelolaan ruang dan sumber daya alam suatu kawasan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan efisien. Sejalan dengan hal tersebut perencanaan wilayah harus mempertimbangkan batasan administratif dan batasan ekosistem untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (Mahi, 2016). Pendapat lain yang sejalan juga menekankan pentingnya integrasi antara rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) untuk memastikan konsistensi dan efektivitas implementasi kebijakan perencanaan wilayah (Widodo, 2017).

Dalam memberikan arah rencana pembangunan suatu wilayah agar dapat memenuhi aspek-aspek perencanaan maka pemerintah Republik Indonesia membuat kebijakan berbentuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kemudian peraturan ini ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang. Secara umum tata ruang merupakan proses perencanaan yang berorientasi pada pemanfaatan ruang secara optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik wilayah (Simamora & Sarjono, 2022). Selain itu Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) juga merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan berdasarkan rencana umum tata ruang yang telah ditetapkan (Indrajoga et al., 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tata ruang didefinisikan sebagai "wujud struktur ruang dan pola ruang, baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota." Perencanaan tata ruang menjadi instrumen penting dalam mengatur pembangunan wilayah agar selaras dengan daya dukung lingkungan, kebutuhan sosial, dan dinamika ekonomi.

Pendekatan teoritik terhadap tata ruang mengacu pada integrasi berbagai dimensi ekologis, ekonomis, sosial, dan politis. Dalam buku *Planning Theory*, Allmendinger membedakan dua pendekatan utama dalam perencanaan yaitu *procedural planning* (penekanan pada proses perencanaan) dan *substantive planning* (penekanan pada isi materi perencanaan) (Allmendinger, 2017). Dalam konteks RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), pendekatan substantif lebih dominan karena fokus pada penentuan peruntukan ruang dan pengendaliannya. Sementara itu teori *sustainable spatial planning* lebih menekankan pentingnya tata ruang yang tidak hanya efisien dari sisi ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan lestari secara ekologis (Alexander, 2015). Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menjadi paradigma global dalam perencanaan wilayah.

RDTRK mencakup aspek pemanfaatan seperti zona peruntukan lahan, jaringan jalan, kawasan konservasi, dan ruang publik. Oleh sebab itu RDTR menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya konflik ruang akibat aktivitas pembangunan yang tidak terkendali

(Savitri & Fransiska, 2022). Fungsi tersebut selain berlaku pada wilayah daratan juga berlaku pada wilayah pesisir dan kepulauan seperti Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) menjadi dokumen penting dalam perencanaan wilayah pesisir yang berfungsi sebagai acuan legal dalam pengembangan suatu kawasan. Perencanaan wilayah pesisir dan kepulauan dalam konteks ini adalah Kepulauan Seribu yang menuntut pendekatan spesifik yang mempertimbangkan keterbatasan akses, kerentanan lingkungan, serta interaksi darat-laut. Perencanaan wilayah pesisir juga memerlukan integrasi spasial dan sektoral untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang serta melindungi ekosistem yang rentan (Clark, 2018).

Dalam membuat suatu perencanaan wilayah banyak terdapat hambatan yang dapat mengurangi efektivitas perencanaan dan hasil yang akan dicapai. Implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah di Indonesia pada umumnya menghadapi tantangan seperti kurangnya komunikasi antar pemangku kepentingan dan keterbatasan sumber daya manusia, yang mempengaruhi efektivitas perencanaan wilayah (Santoso et al., 2020). Untuk itu diperlukan pendekatan yang holistik dan partisipatif dalam proses perencanaan untuk mencapai hasil yang optimal. Kendala perencanaan seperti itu juga dialami oleh Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu sebagai satu-satunya kabupaten administratif yang ada di pusat ibukota.

Kepulauan Seribu merupakan kabupaten administratif di Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil dengan karakteristik ekologis yang unik. Berdasarkan kondisi unik tersebut perencanaan wilayah di kawasan ini memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan aspek ekosistem, sosial, dan ekonomi secara terpadu. Menurut penelitian Kasman yang membahas masalah pengembangan pariwisata berbasis penataan ruang di Pulau Tidung Besar menyebutkan bahwa terdapat ketidaksesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu keberlanjutan pariwisata (Kasman et al., 2023). Oleh karena itu diperlukan peninjauan kembali terhadap RDTR yang berorientasi pada peningkatan pengendalian tata ruang untuk pengembangan pariwisata yang lebih baik. Dengan demikian pendekatan yang mempertimbangkan aspek ekosistem, sosial, dan ekonomi secara terpadu menjadi kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di kawasan ini.

Berdasarkan hambatan perencanaan serta kekhususan karakteristik wilayah dari Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu maka perlu diimbangi dengan perencanaan ruang yang efektif agar dapat mencegah degradasi lingkungan dan konflik kepentingan. Salah satu metode analisis yang digunakan adalah kajian SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats) terhadap RDTR Kepulauan Seribu. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam implementasi perencanaan tata ruang di wilayah agar memberikan gambaran strategi yang dapat digunakan dalam optimalisasi perencanaan khususnya dalam implementasi RDTR Kepulauan Seribu. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Albert Humphrey pada tahun 1960-an dalam konteks manajemen strategis, tetapi kemudian diadaptasi secara luas dalam berbagai bidang termasuk

perencanaan tata ruang. Analisis SWOT memberikan kerangka sistematis untuk menilai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja atau prospek suatu entitas (Gurel & Tat, 2017). Dalam konteks perencanaan ruang, SWOT digunakan untuk menilai kondisi eksisting wilayah dan merumuskan strategi pengembangan berdasarkan potensi dan tantangan yang ada.

Faktor internal (Strenghts dan Weaksnes) mencakup aspek-aspek endogen seperti topografi, kondisi sosial-ekonomi, kelembagaan lokal, serta kapasitas infrastruktur. Sementara faktor eksternal (Oppotunities dan Threats) mencakup aspek eksogen seperti arah kebijakan nasional, perubahan iklim, dinamika pasar, dan tekanan eksternal lainnya. Puyt mengingatkan bahwa SWOT bukan hanya alat inventarisasi, tetapi harus digunakan secara analitis untuk merumuskan strategi yang bersifat implementatif (Puyt et al., 2020) . Dalam konteks RDTR Kepulauan Seribu, analisis SWOT berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi fisik dan non-fisik wilayah serta menyusun arahan pemanfaatan ruang yang adaptif terhadap tantangan kepulauan, seperti keterisolasian, kerentanan bencana, dan tekanan pariwisata.

Meskipun sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas perencanaan tata ruang di wilayah pesisir dan kepulauan Kepulauan Seribu, namun kajian yang mengintegrasikan analisis SWOT secara komprehensif terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai instrumen strategis pembangunan wilayah belum pernah dilakukan. Padahal pendekatan ini penting untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman secara menyeluruh sehingga dapat dirumuskan strategi pengembangan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Misalnya penelitian Aryuliani, S. (2025) hanya fokus pada pemetaan potensi desa wisata di Kepulauan Seribu. Penelitian Fauzan, A. F., & Burhanuddin, A. (2023) membahas potensi dan tantangan pariwisata maritim Kepulauan Seribu, Fransiska, E. (2022) dalam penelitiannya menganalisis kesesuaian penggunaan lahan terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta Kelurahan Pulo Gebang namun belum sampai kepada strategi pengembangannya. Kasman et al. (2023) juga menitikberatkan pada pengembangan pariwisata berbasis penataan ruang di Pulau Tidung Besar. Penelitian Neksidin, et al. (2021) lebih fokus membahas keberlanjutan pengelolaan wisata bahari di Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu.

Berdasarkan kesenjangan tersebut maka penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian mengintegrasikan analisis SWOT secara komprehensif terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pada akhirnya penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam implementasi RDTR Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, serta strategi apa yang dapat dirumuskan untuk optimalisasi pengembangan wilayah secara berkelanjutan. Oleh karena itu dengan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi implementasi RDTR Kepulauan Seribu serta merumuskan strategi pengembangan wilayah yang adaptif terhadap karakteristik lokal dan tantangan pembangunan pesisir yang berkelanjutan.

Metode Penelitian

Metode studi literatur digunakan dengan pendekatan deskriptif analitis serta dengan menggunakan metode analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan melalui serangkaian langkah terstruktur mulai dari penetapan tujuan dan ruang lingkup analisis, pengumpulan data internal dan eksternal, hingga formulasi strategi. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data internal berupa data tata ruang dan data pendukung lainnya, serta data eksternal yang meliputi tren ekonomi, kebijakan pemerintah, dinamika sosial budaya, perkembangan teknologi, dan kondisi lingkungan (Gurel & Tat, 2017) . Berdasarkan data tersebut, faktor kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) diidentifikasi secara spesifik dan terukur. Selanjutnya hubungan antar faktor diolah melalui matriks SWOT untuk menghasilkan strategi SO, ST, WO, dan WT yang relevan.

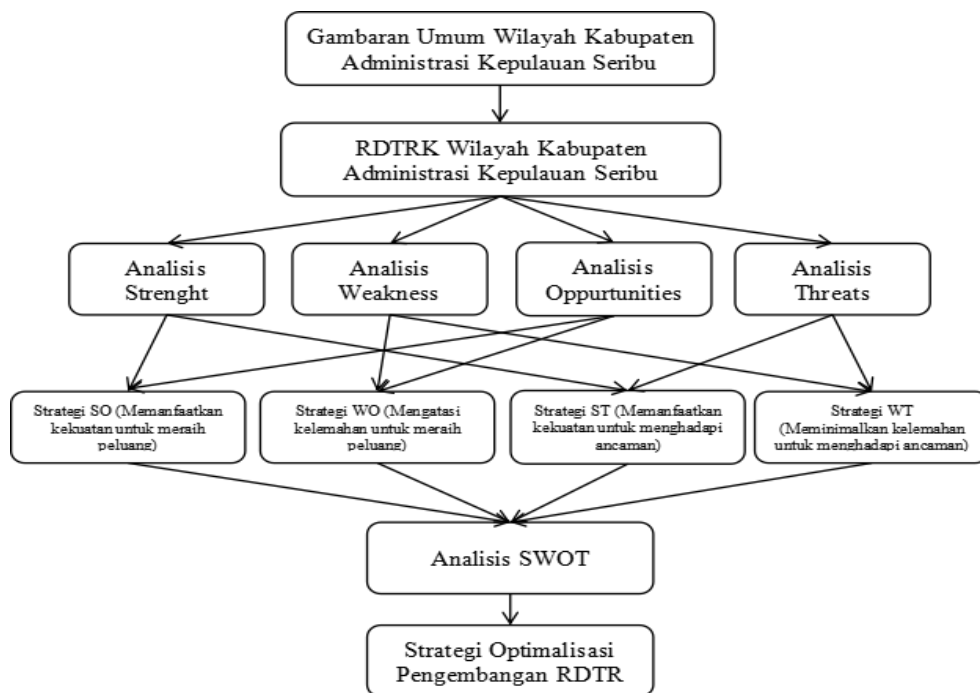
Metode SWOT dinilai paling tepat digunakan untuk menganalisis kasus Kepulauan Seribu karena mampu mengungkap hubungan antara kondisi internal wilayah dan tantangan eksternal yang dihadapi secara seimbang, sehingga menghasilkan strategi yang realistis dan kontekstual pada kasus Kepulauan Seribu. Karakteristik Kepulauan Seribu sebagai wilayah kepulauan dengan keterbatasan lahan, ketergantungan pada ekosistem laut, serta tantangan aksesibilitas memerlukan pendekatan yang tidak hanya memotret peluang eksternal, tetapi juga memperhitungkan kapasitas dan kelemahan internal.

Data diperoleh dari dokumen perencanaan terkait RDTR wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, data statistik, studi pustaka, dan peraturan perundang-undangan. Metode studi literatur digunakan untuk menganalisis konsep-konsep dasar terkait RDTR, perencanaan wilayah, dan implementasi strategi pengembangan kawasan berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Menurut Prayogi studi literatur merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis sumber-sumber ilmiah yang relevan untuk memberikan landasan teoritis dan memperkuat argumen penelitian (Prayogi, 2024) .

Pendekatan deskriptif analitis ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai kondisi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Setelah didapat gambaran umum wilayah lalu kemudian disusun strategi optimalisasi implementasi pengembangan wilayah berdasarkan perencanaan RDTR dan konteks kekhususan wilayah lokal. Pendekatan ini digunakan karena dianggap sesuai dalam menganalisis fenomena sosial ekonomi yang kompleks dengan mempertimbangkan dinamika lokal dan keterbatasan data primer. Pendekatan deskriptif kuantitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui interpretasi terhadap data yang bersifat numerik atau berbasis dokumen. Dalam konteks penelitian ini data diperoleh melalui metode studi kepustakaan (*library research*) dan analisis data sekunder yang mencakup dokumen resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), laporan tahunan pemerintah daerah, publikasi kementerian terkait, serta jurnal ilmiah nasional dan internasional.

Metode ini dianggap tepat karena mampu menggabungkan analisis serta merumuskan strategi berbasis konteks sosial dan lingkungan lokal. Hal ini sejalan dengan pendapat Creswell

yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga mengapa serta bagaimana suatu fenomena berkembang dalam konteks tertentu (Creswell, 2014). Dengan metode ini penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih kontekstual, aplikatif, dan berbasis bukti dalam mendukung perencanaan wilayah yang berkelanjutan di wilayah kepulauan. Untuk lebih memperjelas maka kerangka pikir tulisan ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1 Kerangka Pikir

Tabel 1. Kriteria Analisis

Aspek	Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
Sumber	Internal	Internal	Eksternal	Eksternal
Faktor				
Definisi	Keunggulan/kapabilitas yang dimiliki dan memberi nilai tambah	Kekurangan/keterbatasan yang menghambat pencapaian tujuan	Kondisi atau tren eksternal yang berpotensi menguntungkan	Kondisi atau tren eksternal yang berpotensi merugikan
Kriteria Identifikasi	Spesifik & terukur Didukung data faktual Relevan dengan tujuan pembangunan wilayah Berdampak strategis pada potensi lokal	Spesifik & terukur Didukung data faktual Relevan dengan tujuan pembangunan wilayah Berdampak strategis pada potensi lokal	Bersumber dari lingkungan luar Memiliki peluang manfaat nyata Relevan dengan tujuan pembangunan wilayah Berdampak pada pembangunan wilayah	Bersumber dari lingkungan luar Memiliki risiko nyata Relevan dengan tujuan pembangunan wilayah Berdampak pada pembangunan wilayah

Hasil dan Pembahasan

Secara umum pembagian zona perencanaan yang terdapat pada RDTR Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu didominasi oleh kawasan pariwisata yang mencapai 535,91 Ha atau 48,66% dari total luas wilayah. Ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata merupakan fokus utama dalam pemanfaatan ruang di kawasan ini. Selain itu area permukiman dengan kepadatan sangat tinggi juga mengambil porsi signifikan, yaitu 176 Ha atau 15,98%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa memang pada dasarnya perencanaan pada kawasan Kepulauan Seribu bukan untuk pemukiman alternatif penyangga dari DKI Jakarta daratan akan tetapi hanya sebagai tempat wisata bagi masyarakat kota.

Sementara itu kawasan hijau yang terdiri dari taman pulau kecil, taman nasional, dan suaka margasatwa mencakup total 268,22 Ha atau 24,36% dari luas wilayah. Ini menunjukkan adanya perhatian terhadap pelestarian lingkungan Kepulauan Seribu dan upaya pengembangan ekowisata berbasis konservasi. Namun alokasi ruang untuk sektor perikanan budidaya sangat terbatas yaitu hanya 0,47 Ha atau 0,04%, yang menunjukkan sektor ini belum akan dimanfaatkan secara optimal sebagai potensi ekonomi lokal dikarenakan arah pembangunan ekonomi Kepulauan Seribu memang bukan diprioritaskan untuk ekonomi perikanan.

Pada aspek area transportasi mencakup 20,01 Ha atau 1,82%, yang menandakan pentingnya peningkatan infrastruktur konektivitas antar pulau untuk mendukung mobilitas penduduk dan wisatawan. Sedangkan untuk kawasan perkantoran hanya dialokasikan 5,14 Ha atau 0,47%, menunjukkan bahwa aktivitas komersial perkantoran dan administrasi bukan merupakan sektor dominan di wilayah ini.

Secara keseluruhan data tata ruang Kepulauan Seribu menunjukkan dominasi sektor pariwisata dan permukiman dengan kepadatan tinggi, serta alokasi ruang hijau yang cukup besar untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Namun demikian sektor industri, perikanan budidaya, dan fasilitas publik lainnya masih memerlukan perhatian lebih agar pemanfaatan ruang dapat lebih optimal dan berimbang sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah kepulauan tersebut. Secara detail data penjelasan tersebut diatas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Rencana Pola Ruang RDTR Kepulauan Seribu tahun 2022

No	Tata Ruang	Luas (Ha)	%
1	Badan Jalan	14,38	1,31
2	Cagar Alam	15,57	1,41
3	Jalur Hijau	0,50	0,05
4	Kawasan Peruntukan Industri	13,00	1,18
5	Pariwisata	535,91	48,66
6	Pemukiman	6,55	0,59
7	Perikanan Budi Daya	0,47	0,04
8	Perkantoran	5,14	0,47
9	Perlindungan Setempat	22,29	2,02
10	Pertahanan dan Keamanan	3,57	0,32

11	Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	176,00	15,98
12	SPU Skala Kecamatan	3,38	0,31
13	SPU Skala Kelurahan	6,84	0,62
14	SPU Skala Kota	2,59	0,24
15	Suaka Margasatwa	41,86	3,80
16	Taman Kecamatan	0,31	0,03
17	Taman Kelurahan	2,05	0,19
18	Taman Nasional	56,66	5,15
19	Taman Pulau Kecil	169,70	15,41
20	Taman RT	0,90	0,08
21	Taman RW	3,58	0,33
22	Transportasi	20,01	1,82
TOTAL		1.101,26	100,00

Sumber : RDTR Provinsi DKI Jakarta Perda No. 3 tahun 2022

Diagram 1
Persentase RDTR Kepulauan Seribu tahun 2022

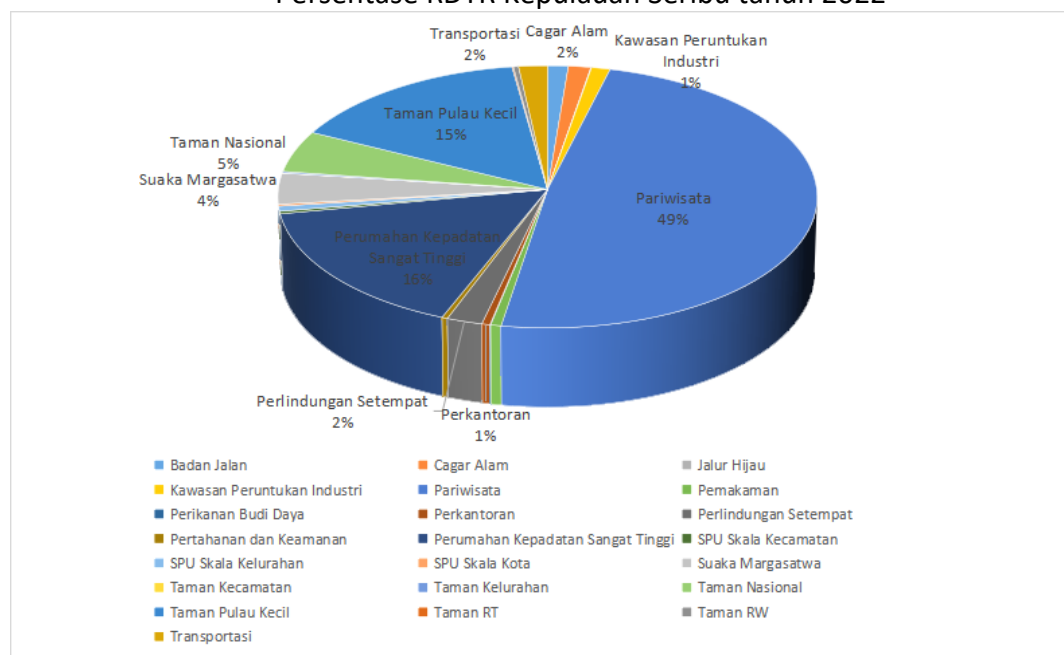


Diagram diatas memperlihatkan komposisi pemanfaatan ruang dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2022. Dari perspektif strategis, distribusi ruang seperti yang ditunjukkan pada diagram ini menegaskan perlunya kebijakan yang lebih seimbang antara pengembangan pariwisata dan sektor ekonomi alternatif, serta peningkatan infrastruktur pendukung. Kondisi lingkungan lebih sulit untuk dijangkau dari pusat pemerintahan yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lainnya (Wibisono, et al, 2019). Pendapat ini diperkuat Mauleny yang menyatakan mayoritas penduduk seperti Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu adalah penduduk marjinal baik miskin atau hampir miskin (Mauleny, 2016). Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan pendekatan khusus terhadap perencanaan

RDTR Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk memajukan perekonomiannya dengan berbasiskan potensi lokal. Jika tidak maka ketergantungan berlebihan pada pariwisata dapat memperbesar risiko (threats) terhadap stabilitas ekonomi daerah ketika terjadi penurunan kunjungan wisata atau bencana alam. Dengan begitu meskipun porsi ruang untuk konservasi cukup besar dan menjadi modal utama pembangunan berkelanjutan, perencanaan RDTR perlu diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor yang saat ini masih terpinggirkan namun berpotensi strategis bagi kemandirian ekonomi wilayah.

Analisis Faktor Internal dan Eksternal (SWOT)

1. Analisis Faktor Internal (Strengths and Weaknesses)

Analisis faktor internal dalam implementasi RDTR di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mencerminkan adanya potensi besar kebijakan yang dapat dimanfaatkan (strength) serta sejumlah tantangan yang perlu diatasi (weakness). Dari sisi kekuatan (strength) kawasan ini memiliki luas wilayah pariwisata yang direncanakan mencapai 48,66% dari total wilayah daratan, sehingga menjadi dapat potensi utama untuk pengembangan ekowisata berbasis lingkungan. Hal ini sejalan dengan pendapat Mashur yang menyatakan bahwa pariwisata berbasis ekologi di wilayah pesisir dapat meningkatkan perekonomian lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan (Mashur & Zulkarnaini, 2022). Selain itu, kawasan konservasi seperti taman nasional, suaka margasatwa, dan taman pulau kecil yang mencakup 24,36% dari luas wilayah juga menjadi kekuatan strategis dalam mendukung pelestarian ekosistem pesisir. Mashur juga menegaskan bahwa kawasan konservasi di wilayah pesisir berfungsi sebagai penyangga ekosistem yang vital dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Dalam memaksimalkan kekuatan RDTRK tersebut diperlukan dukungan regulasi yang jelas dari pemerintah daerah. Dalam hal ini terutama untuk pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi instrumen penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang Kepulauan Seribu. Pendapat ini didukung oleh kajian Wibowo yang menunjukkan bahwa keberadaan regulasi RDTRK mampu mencegah konflik penggunaan lahan melalui penetapan zonasi berbasis fungsi kawasan (Wibowo & Sabet, 2022). Selain itu lokasi Kepulauan Seribu yang strategis dekat dengan pusat kota Jakarta juga menjadi keunggulan tersendiri, terutama dalam pengembangan pariwisata berbasis urban pesisir bagi Provinsi DKI Jakarta. Ditambah lagi dengan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lingkungan semakin meningkat, terutama di kawasan konservasi yang dapat menjadi modal sosial penting dalam implementasi program-program pelestarian lingkungan.

Pada sisi lain juga terdapat sejumlah kelemahan (weakness) yang menjadi kendala dalam pengembangan wilayah ini. Infrastruktur dasar yang masih terbatas, terutama akses transportasi antar pulau yang hanya mencakup 1,82% dari luas wilayah, menjadikan hal ini sebagai hambatan serius dalam mendukung mobilitas penduduk dan wisatawan. Menurut Negara dalam analisisnya menyebutkan bahwa persebaran penduduk di Kepulauan Seribu masih belum merata disebabkan oleh infrastruktur (Negara, 2021). Sejalan dengan itu Fauzan yang menyebutkan bahwa keterbatasan infrastruktur transportasi di wilayah pesisir dapat

menghambat pengembangan ekonomi lokal (Fauzan & Burhanuddin, 2023). Selain itu keterbatasan perencanaan ruang untuk sektor perikanan budidaya yang hanya mencakup 0,04% dari luas wilayah menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang untuk sektor ekonomi berbasis kelautan belum optimal.

Sistem pengelolaan data tata ruang juga masih belum terintegrasi secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Menurut Fauzan pengelolaan data ruang yang terpadu sangat diperlukan untuk menghindari tumpang tindih fungsi lahan dan memastikan efektivitas implementasi RDTRK (Fauzan & Burhanuddin, 2023). Minimnya fasilitas publik seperti taman kelurahan dan taman RT/RW yang hanya mencakup 0,63% dari luas wilayah juga menunjukkan kurangnya ruang terbuka hijau di wilayah permukiman padat penduduk. Pada akhirnya ketergantungan pada sektor pariwisata dapat meningkatkan risiko ekonomi jika terjadi penurunan jumlah wisatawan seperti akibat bencana alam atau pandemi Covid 19 kemarin. Oleh karena itu diversifikasi sektor ekonomi dan penguatan infrastruktur dasar perlu diprioritaskan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Faktor Internal (Strengths and Weaknesses) yang teridentifikasi dalam implementasi RDTR Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menunjukkan adanya peluang strategis sekaligus urgensi penyesuaian arah kebijakan tata ruang. Kekuatan berupa dominasi kawasan pariwisata (48,66%) dan konservasi (24,36%) selaras dengan potensi pengembangan ekowisata berbasis lingkungan, sehingga kebijakan tata ruang dapat diarahkan pada penguatan pariwisata serta konservasi yang saling mendukung. Kedekatan geografis dengan pusat kota Jakarta dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan semakin memperkuat peluang integrasi konsep *urban coastal tourism* dalam RDTR. Namun sisi kelemahan seperti keterbatasan infrastruktur transportasi antar pulau (1,82%) dan minimnya alokasi ruang untuk perikanan budidaya (0,04%) menandakan adanya kesenjangan antara potensi ruang dan kapasitas pendukungnya. Infrastruktur yang terbatas tidak hanya menghambat mobilitas wisatawan dan distribusi hasil produksi perikanan, tetapi juga dapat menurunkan daya saing destinasi jika dibandingkan dengan wilayah pesisir lain yang memiliki konektivitas lebih baik.

Keterbatasan infrastruktur transportasi antar pulau di Kepulauan Seribu yang hanya mencakup 1,82% dari luas wilayah menjadi hambatan strategis dalam implementasi RDTR. Kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas penduduk dan distribusi barang, tetapi juga membatasi pertumbuhan sektor pariwisata dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Rendahnya konektivitas menyebabkan biaya logistik tinggi, akses pasar terbatas, dan pelayanan publik kurang optimal, terutama di pulau-pulau kecil yang terpencil. Kelemahan ini semakin diperburuk oleh belum terintegrasinya sistem data tata ruang, yang mengakibatkan perencanaan pembangunan infrastruktur sering tidak tepat sasaran. Tanpa intervensi kebijakan yang fokus pada peningkatan konektivitas dan pengelolaan data spasial terpadu, potensi besar Kepulauan Seribu sulit dioptimalkan dan kerentanannya terhadap guncangan eksternal akan tetap tinggi.

2. Faktor Eksternal (Opportunities and Threats)

Analisis faktor eksternal dalam implementasi RDTR di Kepulauan Seribu mencerminkan adanya peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan wilayah, namun disisi lain juga menyimpan sejumlah ancaman yang perlu diantisipasi. Dari sisi peluang (opportunities) dimana terdapat tren peningkatan ekowisata masyarakat menjadi momentum penting untuk mengembangkan pariwisata berbasis konservasi yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan pendapat Pengembangan ekowisata di wilayah pesisir dapat menjadi strategi efektif untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat lokal (Mashur & Zulkarnaini, 2022). Selain itu, dukungan dari pemerintah pusat melalui program investasi hijau dan pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir juga membuka peluang untuk peningkatan infrastruktur berbasis lingkungan. Kondisi ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Neksidin dimana masih terdapat dua dimensi pembangunan yang tidak berlanjut yaitu dimensi infrastruktur dan kelembagaan (Neksidin et al., 2021). Program ini berpotensi untuk menarik investasi swasta dalam pengembangan fasilitas wisata ramah lingkungan, sebagaimana diungkapkan oleh Mashur bahwa kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dapat mempercepat pembangunan infrastruktur berkelanjutan di wilayah pesisir (Mashur & Zulkarnaini, 2022).

Peluang lebih lanjut datang dari penggunaan teknologi *smart city* juga berpotensi untuk mendukung pengelolaan tata ruang dan mitigasi bencana secara lebih efektif. Menurut Astuti penerapan sistem *smart city* di kawasan pesisir dapat membantu pemantauan kondisi lingkungan secara *real time*, sehingga keputusan terkait pengelolaan ruang dapat dilakukan lebih cepat dan akurat (Astuti et al., 2024). Potensi kerja sama dengan sektor swasta untuk pengembangan infrastruktur berbasis lingkungan juga menjadi peluang lain yang dapat dimanfaatkan. Dalam hal ini pengembangan sektor perikanan budidaya yang berkelanjutan di area pesisir juga dapat menjadi strategi diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pariwisata.

Meskipun terdapat sejumlah peluang akan tetapi ancaman (*Threats*) yang dihadapi Kepulauan Seribu tidak dapat juga diabaikan. Risiko bencana alam seperti abrasi, banjir rob, dan badai tropis merupakan ancaman serius yang dapat merusak infrastruktur dan mengganggu aktivitas ekonomi. Hal ini sesuai dengan kajian Fauzan yang menyebutkan bahwa wilayah pesisir DKI Jakarta rentan terhadap dampak bencana alam akibat kenaikan muka air laut dan perubahan iklim (Fauzan & Burhanuddin, 2023). Selain itu konflik pemanfaatan ruang antara sektor pariwisata, perikanan, dan permukiman padat penduduk juga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam implementasi RDTRK. Oleh sebab itu pentingnya sinkronisasi perencanaan ruang untuk menghindari tumpang tindih fungsi lahan dan meminimalkan konflik kepentingan antar sektor.

Ancaman lainnya adalah degradasi lingkungan akibat aktivitas wisata yang tidak terkontrol. Ketergantungan pada sektor pariwisata sebagai sumber utama pendapatan wilayah juga dapat meningkatkan kerentanan ekonomi jika terjadi gangguan pada sektor

tersebut, misalnya akibat penurunan jumlah wisatawan atau bencana alam. Dalam hal ini Mashur menyarankan agar strategi diversifikasi ekonomi perlu diterapkan untuk mengurangi risiko ekonomi dan menjaga keberlanjutan pembangunan di wilayah pesisir (Mashur & Zulkarnaini, 2022).

Dengan demikian pengelolaan tata ruang di Kepulauan Seribu harus berfokus pada upaya mitigasi risiko bencana alam, penguatan kerjasama antar sektor, serta peningkatan kapasitas teknologi untuk mendukung pengelolaan ruang berbasis data. Strategi pengembangan RDTR di Kepulauan Seribu harus difokuskan pada peningkatan infrastruktur dasar, penguatan regulasi pengelolaan ruang, penerapan teknologi berbasis data spasial, serta diversifikasi sektor ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada pariwisata. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi RDTR di Kepulauan Seribu dapat berjalan optimal, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan dan dinamika pembangunan.

3. Strategi Pengembangan Kawasan Kepulauan Seribu

Setelah melakukan analisis SWOT terhadap implementasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diperoleh gambaran yang jelas mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi wilayah tersebut. Untuk mempermudah merumuskan formulasi strategi pengembangan RDTR Kepulauan Seribu maka disusun strategi dalam bentuk matriks SWOT sebagai berikut.

Tabel 3. Matriks Analisis SWOT RDTR Kepulauan Seribu

	Strengths (S) - Kawasan pariwisata luas (48,66%) dengan potensi ekowisata. - Adanya kawasan konservasi seperti taman nasional, suaka margasatwa, dan taman pulau kecil yang mencakup 24,36% yang mendukung pelestarian ekosistem pesisir. - Regulasi RDTRK jelas untuk pengembangan pesisir dan pulau kecil. - Lokasi strategis sebagai kawasan pariwisata yang dekat dengan pusat kota Jakarta. - Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan meningkat, terutama di kawasan konservasi.	Weaknesses (W) - Infrastruktur dasar terbatas, khususnya transportasi antar pulau (1,82%). - Keterbatasan ruang untuk sektor perikanan budidaya (0,04%), yang menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan ruang untuk sektor ekonomi berbasis kelautan. - Sistem pengelolaan data tata ruang belum terintegrasi secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. - Minimnya fasilitas publik, taman kelurahan, dan taman RT/RW yang hanya mencakup 0,63% dari luas wilayah. - Ketergantungan pada sektor pariwisata dapat meningkatkan risiko ekonomi jika terjadi penurunan jumlah wisatawan.
Opportunities (Peluang) - Tren peningkatan ekowisata yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pariwisata berbasis konservasi. - Dukungan dari pemerintah pusat untuk program investasi hijau dan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir.	Strategi SO (Memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang): - Mendorong pengembangan ekowisata berbasis zona konservasi untuk meningkatkan potensi pariwisata bahari. - Optimalisasi regulasi RDTRK untuk menarik investasi sektor perikanan berkelanjutan.	Strategi WO (Mengatasi kelemahan untuk meraih peluang): - Peningkatan kapasitas SDM melalui program pelatihan pengelolaan tata ruang berbasis smart city. - Penguatan koordinasi lintas sektor dalam implementasi proyek infrastruktur di kawasan pesisir.

• Penggunaan teknologi smart city untuk pengelolaan tata ruang dan mitigasi bencana. • Potensi kerjasama dengan sektor swasta untuk pengembangan infrastruktur berbasis lingkungan. • Kesempatan untuk mengembangkan sektor perikanan budidaya yang berkelanjutan di area pesisir.	• Memanfaatkan aksesibilitas wilayah untuk memperkuat promosi wisata pesisir.	• Integrasi sistem pengelolaan data tata ruang berbasis teknologi informasi untuk mitigasi bencana.
Threats (Ancaman) • Risiko abrasi, banjir rob, dan badai tropis dapat merusak infrastruktur. • Konflik pemanfaatan ruang antara sektor pariwisata, perikanan, dan permukiman padat penduduk. • Perubahan iklim yang berdampak pada kenaikan muka air laut, mengancam kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. • Degradasi lingkungan akibat wisata tak terkendali. • Kerentanan ekonomi akibat ketergantungan pariwisata.	Strategi ST (Memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman): • Menggunakan regulasi RDTRK mengatur zonasi rawan bencana untuk mitigasi abrasi/rob . • Mengembangkan kebijakan pengelolaan ruang yang adaptif terhadap perubahan iklim. • Memanfaatkan kesadaran masyarakat dalam kegiatan konservasi pesisir untuk mengurangi dampak polusi.	Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghadapi ancaman): • Mengimplementasikan program rehabilitasi kawasan pesisir berbasis konservasi untuk mengurangi dampak abrasi. • Mengintegrasikan pendekatan mitigasi bencana dalam RDTRK untuk wilayah rentan banjir. • Peningkatan fasilitas publik berbasis mitigasi bencana untuk mengurangi kerentanan sosial-ekonomi masyarakat lokal.

Strategi pengembangan RDTR di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dirumuskan berdasarkan analisis SWOT yang terdiri dari strategi SO, WO, ST, dan WT. Strategi SO (strengths-opportunities) difokuskan pada upaya pemanfaatan kekuatan untuk meraih peluang yang ada. Dalam konteks pembahasan ini pengembangan ekowisata berbasis zona konservasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan potensi pariwisata bahari. Kawasan konservasi yang mencakup 24,36% dari luas wilayah dapat dioptimalkan sebagai daya tarik wisata berbasis lingkungan. Selain itu optimalisasi regulasi RDTRK dapat digunakan sebagai instrumen untuk menarik investasi di sektor perikanan berkelanjutan, sehingga sektor ekonomi berbasis kelautan dapat berkembang secara lebih optimal. Dukungan regulasi dan pemanfaatan teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat promosi wisata pesisir dengan memanfaatkan lokasi strategis Kepulauan Seribu yang dekat dengan pusat kota Jakarta. Strategi ini sejalan dengan pendapat Ayu tentang pemanfaatan pemasaran digital dan citra destinasi pada wisata bahari di Kepulauan Seribu (Ayu, 2021) .

Sementara itu strategi WO (weaknesses opportunities) diarahkan untuk mengatasi kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui program pelatihan pengelolaan tata ruang berbasis smart city menjadi prioritas utama untuk memperkuat implementasi dan pengembangan ekonomi lokal. Pendapat ini diperkuat oleh Sapanli dimana sangat penting mempersiapkan SDM pelaksana dalam menciptakan usaha pariwisata baik (Sapanli et al., 2020). Selain itu penguatan koordinasi lintas sektor juga diperlukan untuk mendukung keberhasilan proyek infrastruktur di kawasan pesisir. Integrasi sistem pengelolaan data tata ruang berbasis teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat proses mitigasi bencana, khususnya di wilayah pesisir yang rentan terhadap abrasi dan banjir rob.

Strategi ST (strengths threats) berfokus pada pemanfaatan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Dalam hal ini regulasi RDTRK dapat digunakan untuk mengatur zonasi kawasan rawan bencana guna meminimalkan risiko abrasi dan banjir rob. Selain itu, pengembangan kebijakan pengelolaan ruang yang adaptif terhadap perubahan iklim menjadi langkah penting untuk mengantisipasi kenaikan muka air laut di wilayah pesisir. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi pesisir, sehingga dampak degradasi lingkungan akibat aktivitas wisata dapat diminimalkan.

Adapun strategi WT (weaknesses threats) difokuskan pada upaya meminimalkan kelemahan untuk menghadapi ancaman yang ada. Program rehabilitasi kawasan pesisir berbasis konservasi menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak abrasi di wilayah pesisir. Selain itu integrasi mitigasi bencana dalam perencanaan RDTRK perlu dilakukan untuk mengantisipasi risiko banjir rob di wilayah permukiman padat. Menghadapi tantangan tersebut Musthofa berpendapat dalam penelitiannya terkait keterjangkauan fasilitas publik di kawasan Kepulauan Seribu sangat perlu diperkuat (Wibisono, et al., 2019). Peningkatan fasilitas publik berbasis mitigasi bencana, seperti ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana, juga perlu diperkuat untuk mengurangi kerentanan sosial-ekonomi masyarakat setempat, terutama di kawasan pesisir yang rentan terhadap bencana alam.

Meskipun formulasi akhir merekomendasikan strategi pengembangan pariwisata berbasis konservasi menjadi kekuatan utama RDTR Kepulauan Seribu, dominasi berlebihan sektor ini suatu saat juga dapat menjadi sumber kerentanan ketika terjadi penurunan kunjungan wisata atau bencana alam. Mengurangi kerentanan ini memerlukan strategi yang menggabungkan diversifikasi ekonomi, penguatan infrastruktur, perlindungan ekosistem, dan reformasi tata kelola (Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, 2021). Selain itu proporsi RDTR untuk sektor ekonomi untuk perikanan budidaya yang hanya 0,04% menandakan minimnya perhatian terhadap diversifikasi ekonomi lokal, padahal sektor perikanan berkelanjutan dapat berfungsi sebagai penopang ketika sektor pariwisata terganggu. Oleh sebab itu perlu diambil kebijakan diversifikasi ekonomi bertujuan memperluas sumber pendapatan dengan mengembangkan berbagai sektor sekaligus. Strategi ini membuat perekonomian lebih tahan terhadap guncangan masalah karena tidak mengandalkan satu sektor saja, meskipun memerlukan investasi besar, perencanaan matang, dan sumber daya yang memadai.

Sebagai perbandingan pada kondisi Kabupaten Raja Ampat sudah menerapkan pemberdayaan ekonomi mengintegrasikan perikanan berkelanjutan, konservasi, dan pariwisata. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya diversifikasi ekonomi tanpa mengorbankan fungsi ekologis, sesuai dengan prinsip tata kelola adaptif (Muchlashin et al., 2022). Lain hal dengan Pulau Karimunjawa memberikan pembelajaran penting terkait penguatan infrastruktur konektivitas maritim. Sistem transportasi laut reguler yang mereka kembangkan mendukung arus barang, jasa, dan wisatawan secara lebih efektif, serta menurunkan biaya logistik (Suryawan & Fatchoelqorib, 2018). Sementara itu Wakatobi

menjadi contoh bagaimana pembangunan ekonomi wilayah dengan mengedepankan ekonomi kreatif sebagai bentuk diversifikasi ekonomi mereka (Hadi et al., 2020).

Kesimpulan

Implementasi RDTRK di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mencerminkan kompleksitas tantangan dan potensi yang khas dari wilayah kepulauan. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa sektor pariwisata dan konservasi menjadi kekuatan utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun kelemahannya adalah seperti minimnya infrastruktur, terbatasnya fasilitas publik, dan kurangnya integrasi data ruang menjadi hambatan signifikan. Peluang dari tren ekowisata, dukungan kebijakan pemerintah, dan penerapan teknologi smart city memberikan ruang bagi inovasi pengelolaan ruang. Di sisi lain terdapat ancaman seperti bencana alam, konflik tata guna lahan, dan dampak perubahan iklim perlu diantisipasi dengan kebijakan adaptif dan kolaboratif.

Strategi pengembangan diarahkan pada penguatan ekowisata berbasis konservasi (SO), peningkatan kapasitas SDM dan integrasi data spasial (WO), pemanfaatan regulasi untuk mitigasi bencana dan zonasi adaptif (ST), serta rehabilitasi kawasan dan penguatan fasilitas publik (WT). Dengan pendekatan strategi yang kontekstual dan partisipatif, implementasi RDTR di Kepulauan Seribu diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, serta menciptakan tata ruang yang inklusif, resilien, dan berkelanjutan.

Secara teoretis penelitian ini memperkaya kajian perencanaan wilayah dengan menghadirkan kerangka analisis SWOT yang terintegrasi untuk konteks wilayah pesisir dan kepulauan yang selama ini relatif jarang diaplikasikan pada dokumen RDTR. Dari sisi metodologis pendekatan ini memberikan model evaluasi kebijakan tata ruang yang dapat direplikasi pada wilayah pesisir lain, sekaligus menjadi dasar pengembangan strategi adaptif berbasis potensi dan tantangan spesifik daerah. Namun penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, seluruh analisis didasarkan pada studi literatur dan data sekunder tanpa validasi lapangan, sehingga belum mencerminkan pandangan langsung dari masyarakat atau pemangku kepentingan lokal. Kedua, metode SWOT yang digunakan belum dilengkapi dengan analisis kuantitatif seperti QSPM atau AHP untuk memprioritaskan strategi secara objektif. Ketiga, aspek kelembagaan dan koordinasi antar-instansi belum dibahas secara rinci dimana hal ini sangat krusial dalam implementasi RDTR. Keempat, dimensi sosial budaya masyarakat pulau belum tergali secara mendalam. Terakhir, studi ini belum membandingkan Kepulauan Seribu dengan wilayah kepulauan lain yang memiliki tantangan serupa.

Penelitian lanjutan disarankan untuk mengumpulkan data primer melalui survei atau wawancara, menggunakan pendekatan SWOT kuantitatif, serta menelaah aspek kelembagaan dan sosial budaya secara lebih komprehensif. Komparasi dengan wilayah kepulauan lain juga penting untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan di Kepulauan Seribu guna mewujudkan tata ruang yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Alexander, E. R. (2015). There is No Planning - Only Planning Practices : Notes for Spatial Planning Theories. *Planning Theory*, 15(1), 91–103. <https://doi.org/10.1177/1473095215594617>
- Allmendinger, P. (2017). *Planning theory* (3rd Edition). Bloomsbury Publishing.
- Astuti, S. B., Wahyudie, P., Anggraeni, L. K., Anieqo Tanadda, O., Azahra, L. A., Dewi, M. R., Anugrahaning, M., & Putri, K. (2024). Transformasi Digital dan Sumberdaya Manusia dalam Konsep Intelligent City di Kawasan Pesisir Wilayah Perkotaan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 13(2), 221–233. <https://doi.org/10.23887/JISH.V13I2.75132>
- Ayu, J. P. (2021). Pengaruh Pemasaran Digital dan Citra Destinasi Terhadap Keputusan Berkunjung Pada Wisata Bahari di Kepulauan Seribu | Jurnal Ilmiah Pariwisata. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 26(3), 223–232. <https://doi.org/10.30647/jip.v26i3.1478>
- Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. (2021). *Buku Bunga Rampai - Inovasi Kebijakan Sosial Ekonomi Pembangunan Kelautan dan Perikanan* (Zulham Armen, Zamroni Achmad, Muawanah Umi, & Yusuf Risna, Eds.). AMaFRaD Press.
- Clark, J. R. (2018). *Coastal Zone Management Handbook* (1st Edition). CRC Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th Edition). SAGE Publications.
- Fauzan, A. F., & Burhanuddin, A. (2023). Potensi dan Tantangan Pariwisata Maritim Kepulauan Seribu. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(6), 379–391. <https://doi.org/10.55606/SSCJ-AMIK.V1I6.2391>
- Gurel, E., & Tat, M. (2017). SWOT Analysis : A Theoretical Review. *The Journal of International Social Research*, 10(51), 994–1006. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2017.1832>
- Hadi, S., Wibowo, W., Triyono, J., Rujunia, L. O., & Nasrianto, L. O. (2020). Peningkatan Potensi Wisata Desa Waginopo dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Melalui Program Ekonomi Kreatif. *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni Bagi Masyarakat)*, 9(1), 36–47. <https://doi.org/10.20961/SEMAR.V9I1.42344>
- Indrajoga, D. N., Wipranata, B. I., Deliyanto, B., & Bela, P. A. (2021). Kesesuaian Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta 2030 Dan Perubahan Penggunaan Lahan Di Cipete Raya. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 3(1), 1273–1278. <https://doi.org/10.24912/STUPA.V3I1.11395>
- Kasman, K., Martha, T. L., & Johan, Y. (2023). Pengembangan Pariwisata Berbasis Penataan Ruang di Pulau Tidung Besar Kepulauan Seribu. *Jurnal Enggano*, 8(1), 59–66. <https://doi.org/10.31186/JENGGANO.8.1.59-66>
- Mahi, A. K. (2016). *Pengembangan Wilayah : Teori & Aplikasi*. Kencana.
- Mashur, D., & Zulkarnaini. (2022). Analisis Prospektif Strategi Pengembangan Ekowisata Di Kawasan Pesisir Pantal. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1). <https://doi.org/10.31258/JKP.V13I1.7984>

- Mauleny, A. T. (2016). Aglomerasi, Perubahan Sosial Ekonomi, Dan Kebijakan Pembangunan Jakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 147–162. <https://doi.org/10.22212/JEKP.V6I2.351>
- Muchlashin, A., Putri, W. A., Asya'bani, N., & Nurfajrin, S. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kampung Mumes Raja Ampat Papua Barat. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 3(2), 235–249. <https://doi.org/10.37680/AMALEE.V3I1.1562>
- Negara, A. P. P. (2021). *Analisis Persebaran Penduduk Di Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta* [Universitas Negeri Jakarta]. <http://repository.unj.ac.id/18638/>
- Neksidin, Fahrudin, A., & Krisanti, M. (2021). Keberlanjutan Pengelolaan Wisata Bahari di Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 26(2), 284–291. <https://doi.org/10.18343/jipi.26.2.284>
- Suryawan, R. F., & Fatchoelqorib, M. (2018). Penerbangan Perintis dalam Mengembangkan Perekonomian di Pulau Karimunjawa. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 5(2), 161–168. <https://doi.org/10.54324/J.MTL.V5I2.237>
- Prayogi, A. (2024). *Metodologi Penelitian : Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Siska Febri Nuriza, Ed.). CV. Lauk Puyu Press.
- Puyt, R. W., Lie, F. B., De Graaf, F. J., & Wilderom, C. P. M. (2020). Origins of Swot Analysis. *Academy of Management Annual Meeting Proceedings*. <https://doi.org/10.5465/AMBPP.2020.132>
- Santoso, E. B., Iswi, A., & Yanuasmara, I. (2020). Inovasi, Masalah, Dan Tantangan Dalam Penyusunan RDTR Untuk OSS : Kasus Pada Penyusunan RDTR Di Sendawar Timur, Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 46(1), 230–241. <https://doi.org/10.33701/JIPWP.V46I1.1092>
- Sapanli, K., Kusumastanto, T., Budiharsono, S., & Sadelie, A. (2020). Dinamika dan kebijakan pengembangan ekonomi kelautan Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 10(2), 117–128. <https://doi.org/10.15578/JKSEKP.V10I2.9248>
- Savitri, R., & Fransiska, E. (2022). Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur. *Jurnal Ilmiah Plano Krisna*, 18(1), 28–45. <https://jurnalteknik.unkris.ac.id/index.php/plano/article/view/172>
- Simamora, J., & Sarjono, A. G. A. (2022). Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 3(1), 59–73. <https://doi.org/10.51622/NJLO.V3I1.611>
- Wibisono, H., Musthofa, A., & Haryanto, I. (2019). Keterjangkauan Fasilitas Publik di Kawasan Pulau-Pulau Kecil : Studi Kasus Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. *Jurnal Geografi*, 11, 135–145. <https://doi.org/10.24114/JG.V11I2.10638>
- Wibisono, H., Musthofa, A., Kusuma, M. E., & Haryanto, I. (2019). Transformasi Wilayah Kepulauan di Metropolitan Jakarta. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 7(3), 181–195. <https://doi.org/10.14710/JWL.7.3.181-195>

- Wibowo, P. A., & Sabet, F. B. A. (2022). Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pesisir dan Laut dalam Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 6(2), 74–85. <https://doi.org/10.15642/OJE.2022.6.2.74-85>
- Widodo, S. (2017). Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Perspektif Perencanaan Pembangunan Wilayah (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 3(3), 166–172. <https://doi.org/10.21776/UB.JIAP.2017.003.03.2>